

# **POLICY IMPLEMENTATION BPJS HEALTH AT PUSKESMAS PATLEAN, NORTH MABA DISTRICT, EAST HALMAHERA DISTRICT**

**NELSA NOVIANA KAOTJI  
FEMMY M.G. TULUSAN  
RULLY MAMBO**

*Abstract: Policy Implementation social security organizing body (BPJS) health, is an important in the world of health. Through Policy Implementation BPJS health. Is expected to help people who are less able in the world health, especially in terms of treatment a hospital or puskesmas. success of policy implementation bpjs health, depending on the aspect of communication, resources, disposition, bureaucratic structure. If the four variables support each other, then policy implementation BPJS health can be achieved effectively and on target. The purpose of policy implementation BPJS health is to achieve the degree of the poor or economically weak in the needs of treatment. On of the efforts made by the government is to take health card BPJS program. and by providing facilities and infrastructure at health center for the implementation of health on target. The purpose of this study is to know Policy Implementation BPJS Health At Puskesmas . The benefits of this research are to provide input to the Health Center or stakeholders within Policy Implementation BPJS Health At Puskesmas Patlean, North Maba District, East Halmahera District. The method used is qualitative method, with type of descriptive approach and research location patlean village North Maba District, East Halmahera District. Data collection is done by observation and in-depth interview to informant. Based on the results of the study there are several factors that must be corrected communication, resources, disposition, bureaucratic structure. so inside Policy Implementation BPJS Health At puskesmas goes according to expectations. Based on the results of the study there are several factors that must be corrected : communication, tesources, disposition, and bureaucratic structure. So that in the implementation of the policy BPJS the health program at the puskesmas goes according to expectations.*

*Keywords : policy implementation, healt social security*

## **PENDAHULUAN**

Jaminan kesehatan Nasional (JKN) adalah program pemerintah Indonesia untuk menjamin kesehatan warga negaranya agar dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Program ini lahir dengan dikeluarkannya UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang merupakan operasionalisasi dari kehendak UUD 1945 pasal 28 H ayat ( 1 ) yang menyatakan : bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sejak diberlakukan 1 januari 2014 lalu, pemerintah Indonesia terus melakukan

pembenahan baik sistem, regulasi dan kelembagaan institusi penyelenggaraan bpjs kesehatan. Tujuannya adalah agar pelayanan kesehatan kepada peserta /masyarakat dari hari ke hari menjadi semakin baik.

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun Rakyat Biasa

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Implementasi**

Implementasi adalah Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan adanya jaringan komputerisasi menjadi lebih cepat dan tentunya dapat menghemat pengeluaran biaya. Pelayanan tersebut terjadi sudah tidak membutuhkan banyak tenaga manusia lagi melainkan yang dibutuhkan adalah manusia yang mempunyai ahli untuk mengeprasionalkan jaringan komputerisasi tersebut.

### **Konsep Kebijakan**

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

### **Konsep Implementasi Kebijakan**

Implementasi Kebijakan Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012:21), "implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan". Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka.

Oleh karena itulah implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting di dalam kebijakan publik.

### **BPJS ( Badan Penyelenggara Jaminan sosial ) Kesehatan**

BPJS kesehatan merupakan badan hukum publik yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditujukan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Pembentukan BPJS Kesehatan ini berlandaskan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan mekanisme atau tata cara pelaksanaannya di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.

### **Konsep Puskesmas**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No 128/MenKes/Sk/II/2004 tentang kebijakan dasar puskesmas mempunyai fungsi sebagai pusat penggerak pembangunan yang berwawasan kesehatan dimana puskesmas aktif membantu dan melaporkan dampak kesehatan program pembangunan dan pemeliharaan kesehatan pencegah, penyembuhan dan pemulihan kesehatan melalui pelayanan yang diberikan.

### **Standar Operasional Prosedur (SOP) Puskesmas.**

Untuk melakukan setiap pekerjaan/ kegiatan di puskesmas tentu kita membutuhkan acuan atau petunjuk pelaksanaan kegiatan yang terstandarisasi atau standar operasional prosedur (SOP) yang dituangkan dalam suatu bentuk dokumen puskesmas.

## **Struktur Organisasi Puskesmas**

Struktur organisasi akan diterapkan dalam kegiatan operasional puskesmas tergantung dari visi, misi, tujuan, fungsi serta beban kegiatan dan program masing-masing puskesmas.

Penyusunan struktur organisasi puskesmas dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/ kota yang ditetapkan oleh peraturan daerah kabupaten/ kota. Umumnya struktur organisasi puskesmas terdiri dari :

- a) Kepala Puskesmas
- b) Unit tata usaha
- c) Unit pelaksana teknis fungsional, yang terdiri dari :
  1. Unit yang terdiri dari tenaga atau pegawai dalam jabatan fungsional.
  2. Unit terdiri dari : I, II, III, IV, V, VI, dan VII.

## **Tata Kerja Puskesmas.**

Tata kerja puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah, sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan kantor kecamatan
2. Bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten / kota
3. Bermitra dengan sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya
4. Menjalin kerjasama yang erat dengan fasilitas rujukan
5. Berkoordinasi dengan lintas sektor
6. Bermitra dengan organisasi yang menghimpun tokoh masyarakat yang peduli kesehatan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Selanjutnya menurut Bugdon dan Taylor

dalam Moeleong (2005 : 5-6), Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dengan cara deskripsi, dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.

### **Lokasi Penelitian**

Dalam setiap penelitian lokasi/tempat penelitian sangat penting dimana peneliti telah memilih lokasi penelitian untuk menjadi objek/tempat penelitian adalah, Puskesmas Patlean, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur.

### **Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini saya memilih 15 informan yang terdiri dari Kepala Puskesmas, Staff Pegawai Puskesmas dan Masyarakat pengguna kartu BPJS

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder.

#### **Data Primer**

Teknik pengumpulan data primer yaitu : data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data-data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti

#### **Data Sekunder**

Data sekunder adalah : data yang diperoleh baik yang belum diolah maupun yang telah diolah, baik dalam bentuk angka maupun uraian. Dalam penelitian ini data-data sekunder yang

diperlukan literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel, makalah, peraturan-peraturan dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti

### **Fokus penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitiannya adalah : Implementasi Kebijakan BPJS Kesehatan Di Puskesmas Patlean, Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur, Dan dilihat dari masalah yang diteliti

### **Teknik Analisis Data**

Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Kesimpulan dan Verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Kecamatan Maba Utara**

Kecamatan Maba Utara, memiliki luas 899,45 km bujur sangkar (14% untuk keseluruhan Halmahera Timur) dengan luas keseluruhannya di daratan pulau Halmahera. Beribu kota di Dorosago yang berjarak sekitar 122,53 km dari ibu kota kabupaten Halmahera Timur. Memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara kecamatan wasile utara
2. Sebelah selatan kecamatan maba tengah
3. Sebelah barat kecamatan wasile tengah
4. sebelah timur dengan samudera pasifik.

### **Geografi**

Puskesmas Patlean Merupakan pemekaran dari Puskesmas Dorosago Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur, yang diresmikan pada tanggal 9 mei 2015 oleh bupati halmahera timur bapak H. Ruddy

Erawan S.E. M.Si Mempunyai luas wilayah 62.611 Km Bujur Sangkar. Terdiri Dari 7 Desa Devinitif, 1 Anak Desa.

### **Sarana Transportasi**

Fasilitas Perhubungan :

1)Jalan laut yang menghubungkan Antara Buli Dan Tobelo,Transportasi Laut, Sarana komunikasi

### **Sarana Pelayanan Kesehatan**

Puskesmas Patlean ( Rawat Jalan ),Polik Umum,UGD, Ruang Nifas,Apotik,Gudang Obat,Ruang Perawatan,Dapur,Ruang Vaksin,Polindes, Pustu.

### **Deskripsi Hasil Wawancara**

Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh melalui wawancara terhadap para informan. Untuk daftar pertanyaan sendiri dikategorikan menjadi 2 yaitu pertanyaan untuk 6 orang pegawai puskesmas patlean kecamatan maba utara kabupaten Halmahera timur, dan pertanyaan untuk 10 orang masyarakat umum yang menggunakan kartu Bpjs Kesehatan, jadi jumlah informan yang berhasil diwawancarai adalah 16 orang.

### **Rangkuman Hasil Wawancara**

#### **1. Komunikasi**

Adapun masyarakat yang sudah memiliki kartu bpjs kesehatan tapi tidak tahu bagaimana cara menggunakannya dan apa saja syarat di perlukan saat berobat menggunakan kartu bpjs kesehatan. Hal ini perlu diperhatikan lagi dari pelaksana kebijakan kepada penerima agar ada sosialisasi kepada masyarakat tentang bpjs kesehatan, supaya masyarakat yang tidak tahu program pemerintah tentang bpjs kesehatan menjadi tahu. Sehingga hal ini bermanfaat bagi masyarakat yang mempunyai ekonomi lemah dan dapat mengurangi biaya perobatan yang ada.

## 2. Sumber Daya

Dilihat dari sumberdaya, berdasarkan hasil dan observasi dalam implementasi kebijakan bpjs kesehatan di puskesmas patlean belum efektif karna kualitas atau daya kerja di puskesmas masih banyak terdapat kendala kekurangan sumber daya seperti : sumber daya manusia, fasilitas sarana dan prasarana yang kurang dan sistem penganggaran juga belum sepenuhnya di puskesmas patlean masih di puskesmas kecamatan dorosago

## 3. Disposisi

Pelayanan yang diberikan bagi masyarakat berbeda-beda, masyarakat pengguna kartu bpjs kesehatan seringkali diabaikan oleh pihak pemerintah/puskesmas yang ada dan diutamakan masyarakat umum yang langsung dibayar. Hal ini Disposisi berperan penting dalam menunjang keberhasilan suatu organisasi.

## 4. Struktur Birokrasi

Pelaksana kebijakan tidak bisa menjangkau setiap kader-kader desa wilaya kerja puskesmas patlean. Oleh karna itu dihimbau agar kedepannya struktur birokrasi lebih diperhatikan, karna tanpa struktur birokrasikebijakan tidak berjalan dengan baik. Pemerintah lebih lagi memperhatikan struktur birokrasi agar lebih jelas dalam implementasi kebijakan bpjs kesehatan.

## Pembahasan

1. Komunikasi, yang dimaksud sini informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat meahami apa yang menjadi isi tujuan dan arah, kelompok sasaran ( *target grup* ) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan

kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu : transformasi informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi.

2. Sumber Daya yang dimaksud berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Meliputi fasilitas sarana dan prasarana, tenaga kesehatan terutama belum ada dokter di puskesmas patlean serta ruangan pasien masih belum memadai karna Kenyataannya hasil penelitian program-program puskesmas yang dibuat belum sepenuhnya berjalan dengan efektif, karna banyak kendala-kendala yang terjadi.
3. Disposisi, kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas dan wewenang, fungsi, dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
4. Struktur Birokrasi diperlukan untuk mengatur sumber daya yang ada di puskesmas patlean atau pelaksana dapat melaksanakan kegiatan dengan baik. Puskesmas patlean

membutuhkan struktur birokrasi yang kuat agar dapat mengatur kerjasama orang-orang atau sumber daya di dalamnya secara efektif.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Komunikasi, Implementasi kebijakan bpjs kesehatan di puskesmas belum sepenuhnya efektif. Karna penyelenggara dan pelaksana kebijakan bpjs kurang mempromosikan/ sosialisasikan program bpjs kesehatan kepada kelompok sasaran atau masyarakat.
2. Sumber Daya, implementasi kebijakan bpjs kesehatan di puskesmas patlean, kecamatan maba utara kabupaten Halmahera timur. Belum sepenuhnya efektif, karena masih banyak terdapat kendala dalam sumber daya yang ada. Dalam sebuah implementasi kebijakan menjadi indikator yang paling penting selain variabel komunikasi.
3. Disposisi, implelementasi kebijakan bpjs kesehatan di puskesmas patlean belum sepenuhnya efektif, karena masih di temukan dari penyelenggara atau pelaksana kebijakan yang mempunyai disposisi atau karakter yang tidak jujur dan berkomitmen tinggi
4. Struktur Birokrasi, implementasi kebijakan bpjs kesehatan di puskesmas patlean belum efektif karna penyelenggara/pelaksana kebijakan bpjs kesehatan kurang mampu memanfaatkan unit-unit wilaya kerjanya dalam mendukung kebijakan yang sudah disepakati bersama.

### **Saran**

1. Komunikasi : yaitu informasi/sosialisiperlu di tingkatkan lagi, agar implementasi kebijakan BPJS kesehatan di puskesmas patlean, kecamatan maba utara kabupaten Halmahera timur, berjalan sesuai dengan prosedur bpjs kesehatan yang telah ditetapkan bersama2.
2. Sumber Daya : Ini sangat berpengaruh penting, suatu tujuan jika berjalan dengan baik maka harus ada sumber daya didalamnya untuk mendukung keberhasilan tersebut. Maka dari itu pemerintah harus lebih jeli lagi memperhatikan sumber daya yang ada
3. Disposisi : dalam pelaksana kebijakan sangat diperlukan karakteristik seseorang, oleh karna itu sangat diharapkan harus mempunyai kejujuran dan komitmen yang tinggi, agar implementasi kebijakan bpjs kesehatan dipuskesmas patlean sesuai dengan harapan semua pihak.
4. Struktur Birokrasi : Struktur birokrasi Perlunya melakukan pembuatan SOP (Standart Operation Procedur) dari pelaksana. Tanpa adanya struktur birokrasi kebijakan tidak berjalan dengan baik. Oleh karna itu, pemerintah lebih lagi memperhatikan struktur birokrasi agar lebih jelas dalam implementasi kebijakan bpjs kesehatan di puskesmas patlean kecamatan maba utara kabupaten Halmahera timur.